

Ikhtisar Webinar

Konflik Rusia-Ukraina dan Risiko Ekonomi Politik bagi Indonesia



Konflik Rusia-Ukraina dan Risiko Ekonomi Politik bagi Indonesia

04 Maret 2022 | 14:00–16:00 WIB

Webinar Konflik-Ukraina dan Risiko Ekonomi Politik bagi Indonesia dipandu oleh Reyhan Noor, Analis Kebijakan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), serta dibuka dengan kata sambutan oleh Iis Gindarsah, Koordinator LAB 45, dan *special remarks* oleh Andi Widjajanto, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) sekaligus Penasihat Senior LAB 45. Empat narasumber dalam *webinar* ini adalah (1) Kusnanto Anggoro, Direktur Eksekutif dari *Center for Indonesian Risk Studies*; (2) Eric Sugandi, Konsultan Proyek di *Asian Development Bank Institute* (ADB); (3) Agus E. Siregar, Deputy Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta (4) Reine Prihandoko, Analis Kebijakan LAB 45, yang memantik diskusi dengan paparan hasil kajian LAB 45.

Andi Widjajanto menyampaikan *special remarks*-nya dengan memberikan beberapa pertanyaan penelitian yang mungkin diteliti dari konflik di Ukraina, seperti mengapa Eropa sejak 1991 belum berhasil memiliki perimbangan kekuatan dan kerangka keamanan? Mengapa proses kerja sama dan demokratisasi di Eropa Tengah dan Timur gagal untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di Eropa? Mengapa upaya diplomasi, secara bilateral maupun kolektif, gagal mencegah terjadinya kekerasan di Ukraina? Mengapa militer yang diasumsikan mampu menggelar perimbangan kekuatan, gagal melakukannya? Menurut Andi, konflik ini menarik karena berupa konflik asimetris dengan perbedaan strategi yang diambil dan timpangnya kekuatan yang dimiliki. Negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization*, NATO) menggunakan instrumen sanksi ekonomi sebagai tekanan diplomatis agar Rusia menghentikan kekerasannya. Pendekatan yang asimetris ini di satu sisi mengupayakan deeskalasi konflik, tetapi juga memunculkan kompleksitas isu jangka panjang yang juga berpengaruh ke Indonesia. *Webinar* ini diharapkan bisa memberikan peringatan dini bagi pemerintah untuk melakukan mitigasi dari meluasnya dampak-dampak politik dan ekonomi dari konflik di Ukraina, terutama saat sedang melakukan pemulihan ekonomi nasional.

Reine Prihandoko memaparkan hasil kajian LAB 45 dengan memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina dan struktur regional Eropa. Isu

perluasan anggota NATO yang mencakup Ukraina adalah pemicu operasi militer Rusia di Ukraina. Ada 5 skenario perkembangan konflik di Ukraina, yaitu Ukraina Netral, Kebuntuan Diplomasi (*Stalemate*), Konflik Proksi, Perang Terbuka, dan Perang Nuklir. Perkembangan terkini di Ukraina mengarah pada skenario Konflik Proksi. Terdapat beberapa indikator yang membuktikan, seperti intensi ofensif Rusia yang melakukan infiltrasi pasukan dan menyerang instalasi militer Ukraina, serta dukungan Putin terhadap kelompok separatis. Di sisi lain, meskipun Ukraina terlihat masih mengupayakan politik *balancing*-nya, NATO cenderung merespons seluruh situasi ini dengan menahan diri dari terlibat langsung. Meski begitu, eskalasi konflik berpeluang meningkat jika terjadi beberapa hal, seperti Ukraina berhasil menjadi aliansi NATO dan mampu mengaktifkan Artikel 5, guncangan perdagangan energi di Eropa, Rusia semakin terdesak dengan sanksi-sanksi ekonomi, serta terlebih jika Amerika Serikat (AS) membalas ancaman nuklir Rusia dengan ancaman nuklir juga. Hasil kajian menunjukkan konflik Ukraina memberi risiko bagi Indonesia dengan adanya efek bola salju yang berujung kepada inflasi. Diawali dengan kenaikan harga minyak mentah dan gas alam yang kemudian akan memengaruhi biaya listrik, pupuk dan pangan. Sejalan dengan disrupsi *supply chain* serta peningkatan biaya distribusi, pada akhirnya akan mendorong peningkatan inflasi dalam negeri. Indonesia tidak bergantung kepada Rusia untuk memenuhi pasokan energi. Akan tetapi, posisi Rusia sebagai salah satu negara pemasok utama minyak bumi dan gas dunia secara nyata akan mempengaruhi tingkat harga minyak di pasar global. Indonesia sebagai negara yang memenuhi sebagian kebutuhan minyak mentah dari impor tentu akan memperoleh risiko dari peningkatan harga minyak global tersebut.

LAB 45 mencoba menakar risiko dengan melakukan simulasi pembesaran beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 5 skenario. Simulasi skenario Konflik Proksi menunjukkan harga minyak berpotensi mencapai harga AS\$ 100/barel dan kurs rupiah berpotensi mengalami pelemahan hingga Rp 16.056 per dolar AS. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, jumlah subsidi BBM tahun 2022 berpotensi mencapai Rp 20,05 Triliun atau lebih tinggi Rp 8,75 Triliun jika dibandingkan dengan target APBN 2022. Untuk mitigasi risiko ini, terdapat beberapa rekomendasi bagi para pengambil kebijakan, seperti menjaga “otonomi strategis”, melakukan diversifikasi sumber impor energi,

menambah alokasi dana subsidi BBM dengan menggunakan dana luar kerangka fiskal (*extrabudgetary fund*) dan menyesuaikan harga BBM non subsidi, serta mewaspadai risiko-risiko finansial, termasuk volatilitas nilai tukar yang disebabkan oleh dinamika geopolitik ke depan.

Pembicara selanjutnya, Kusnanto Anggoro, mengingatkan adanya fenomena *Black Swan* dan *Fog of War*. Konflik di Ukraina terjadi akibat perkembangan yang tidak sinkron antara institusi ekonomi yang terglobalisasi dengan arsitektur politik keamanan. Ukraina bisa membangun ekonomi dan institusi demokrasi tanpa harus bergabung ke aliansi militer, terutama NATO, yang membuat Eropa tidak stabil. Sempat ada Format Normandy sebagai resolusi konflik yang lebih bisa diterima oleh Rusia karena tidak melibatkan AS dan Inggris. Sementara itu, sanksi ekonomi bersifat tidak efektif, karena Rusia memiliki cadangan mata uang yang besar, rasio hutang terhadap *produk domestik bruto* (PDB) yang rendah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, justru negara-negara Barat seperti Jerman akan berpotensi menanggung risiko lebih besar karena mayoritas pemenuhan kebutuhan energi negara-negara tersebut berasal dari Rusia. Sebagai tambahan, penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional Rusia cukup rendah. Secara khusus, Kusnanto melihat dampak langsung konflik Ukraina terhadap Indonesia tidak terlalu besar karena faktor geografis dan hubungan perdagangan yang tidak terlalu dekat.

Eric Sugandi sebagai pembicara selanjutnya menjelaskan bahwa negara-negara Barat sudah menjatuhkan sanksi ekonomi untuk Rusia dalam berbagai bentuk. Sayangnya, sanksi hanya akan efektif dalam merugikan ekonomi Rusia, tetapi tidak efektif untuk menghentikan agresi Rusia ataupun menggulingkan rezim Putin. Reaksi pasar finansial global terhadap eskalasi konflik Rusia-Ukraina adalah penurunan indeks saham bursa-bursa utama di dunia secara terbatas, kecuali indeks bursa saham Rusia yang jatuh secara tajam. Beralih ke pasar valuta asing, mata uang Euro, GBP, dan Rubel mengalami pelemahan sejak terjadinya eskalasi konflik karena investor global mengurangi aset di Uni Eropa dan Rusia. Sementara itu, mata uang negara Asia termasuk Rupiah cenderung stabil dengan volatilitas terbatas. Selanjutnya dalam konteks reaksi di pasar komoditas global, invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan peningkatan harga komoditas energi di pasar komoditas global, terutama batu bara dan minyak mentah. Dalam situasi ini, Indonesia tidak akan memperoleh keuntungan

karena saat ini Indonesia telah menjadi negara importir minyak. Sebaliknya, fenomena peningkatan harga minyak dunia dapat mempengaruhi tingkat inflasi serta defisit neraca transaksi berjalan. Selain itu, dari sisi neraca perdagangan jasa turut akan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan biaya transportasi. Sebagai tambahan, invasi Rusia ke Ukraina juga menaikkan harga komoditas pangan, khususnya gandum dan jagung. Hal tersebut karena Rusia adalah eksportir gandum terbesar di dunia sementara Ukraina merupakan eksportir gandum terbesar kelima di dunia. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar tujuan ekspor gandum Ukraina. Peningkatan harga-harga komoditas energi dan pangan itu dapat mengancam pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, dampak langsung konflik Rusia-Ukraina terhadap Indonesia terbatas. Hal tersebut sejalan dengan situasi Rusia dan Ukraina bukan negara mitra dagang dan investor FDI serta portofolio utama Indonesia.

Paparan dilanjutkan oleh Agus Siregar yang menjelaskan bahwa persoalan global yang dihadapi bahkan sebelum eskalasi konflik Rusia-Ukraina berlangsung. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan inflasi global yang memaksa setiap negara melakukan normalisasi kebijakan fiskal dan moneter. Secara khusus terkait sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan AS, Uni Eropa, dan sekutunya terhadap Rusia. Dalam hal ini China memegang peranan penting dalam menetralkan dampak sanksi yang dikenakan terhadap Rusia. Hal ini berkenaan dengan kerja sama Rusia-China yang telah terjalin untuk beberapa waktu ke depan, seperti kontrak 25 tahun terkait jalur pipa gas *Power of Siberia*, kontrak 10 tahun penyediaan minyak bumi dengan CNPC lewat jalur Kazakhstan, dan seterusnya. Selain itu, transaksi perdagangan kedua negara pun hanya 33% yang menggunakan mata uang dolar AS. Rusia juga telah menggantikan ketergantungan impor dari Uni Eropa dengan China. Adapun dampak perang Rusia-Ukraina terhadap Perekonomian Indonesia dapat dijumpai dalam tiga jalur: (1) sektor keuangan (2) perdagangan dan (3) sektor komoditas. Dalam sektor keuangan, volatilitas pasar keuangan domestik serta pembiayaan pemerintah dan dunia usaha akan meningkat. Berkaitan dengan hal ini, sikap bank sentral global yang lebih akomodatif akan mengurangi kepanikan pasar. Dalam jalur perdagangan, penurunan ekspor ke Rusia dan Ukraina memiliki dampak terbatas. Akan tetapi, sebagai negara pengeksportir komoditas, kenaikan harga komoditas dapat

berkontribusi positif terhadap pertumbuhan nasional. Dalam jalur sektor komoditas, potensi kenaikan inflasi dari penyesuaian harga energi yang diatur pemerintah serta kenaikan harga pangan dapat meningkatkan ketegangan sosial. Kondisi tersebut akan mendorong Bank Indonesia lebih agresif dalam menormalisasi kebijakan. Salah satu yang perlu dicermati secara lebih lanjut, yakni kenaikan *administered price* yang berpotensi menaikkan inflasi cukup signifikan. Hal ini berkaitan pula dengan ketetapan target defisit APBN kembali pada tingkat 3% pada tahun 2023. Sementara, kondisi saat ini menunjukkan adanya persoalan baru yang mempengaruhi peningkatan harga energi dan pangan.

Pada sesi tanya jawab, Reyhan Noor menyampaikan pertanyaan bagaimana pengaruh konflik Rusia-Ukraina terhadap aliran modal asing ke Indonesia, serta seberapa besar dampak konflik terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Agus E. Siregar menanggapi bahwa pasar saham bergerak berdasarkan fundamentalnya yang secara utama sangat bergantung pada kinerja korporasi di pasar saham. Untuk saat ini, kinerja korporasi di pasar saham Indonesia, terutama perbankan, batu bara dan CPO menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut sejalan dengan kondisi pasar saham Indonesia yang mengalami pembelian bersih oleh investor asing. Selanjutnya, pengaruh konflik terhadap inflasi tidak akan signifikan, tetapi nilai tukar akan tergantung pada bagaimana respons bank sentral utama dunia, terutama The Fed pada bulan Maret ini. Pasar dan para ekonom melihat bahwa kondisi saat ini justru akan mengerem laju kenaikan suku bunga menjadi 4-5 kali. Hal yang menarik untuk diperhatikan dalam pasar keuangan adalah *risk on*, yakni ketika risiko sudah diakomodasi sebelumnya (*forward looking*), maka gejolak menjadi tidak signifikan.

Pertanyaan berikutnya terkait bidang saham yang patut diperhatikan dalam situasi eskalasi konflik Rusia-Ukraina. Eric Sugandi berpendapat bahwa saham yang akan diuntungkan yakni yang berada pada sektor energi. Sementara saham yang harus diwaspadai yakni berada pada sektor manufaktur berkenaan dengan risiko *imported inflation*, sektor perdagangan serta makanan-minuman. Sebagai catatan, seperti disampaikan oleh Agus sebelumnya, bahwa mengenai saham harus dicermati kinerja per perusahaan alih-alih makro ekonomi.

Bergeser ke aspek politik keamanan, timbul pertanyaan mengenai seberapa besar kemungkinan perluasan cakupan konflik, atau bahkan bisa memicu Cina untuk turut menginvasi Taiwan. Kusnanto Anggoro menjawab bahwa sekarang tidak mungkin Cina menginvasi Taiwan karena tantangan geografis dan sedang memprioritaskan konsolidasi politik domestik. Sedangkan untuk resolusi konflik, Format Normandy masih dirasa paling cocok untuk memberi ruang pada usaha negosiasi dan diplomasi daripada memperluas cakupan konflik. Pertanyaan selanjutnya terhadap dampak konflik pada pembelian alutsista dari Rusia. Reine Prihandoko menjelaskan bahwa secara umum Indonesia mengupayakan diversifikasi dengan mempunyai ambisi kebijakan pertahanan yang autarki. Oleh karena itu, kebijakan yang akan diambil dalam pemenuhan alutsista pun sudah mempertimbangkan risiko tersebut.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Jumat, 4 Maret
2022

➔ +62 812 8218 4545

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id